

Temuan Pansus Angket DPR Ada Konspirasi Pemberangkatan Jemaah Haji

JAKARTA (KR) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jemaah haji 2024 dalam konteks pembayaran maupun pemberangkatan haji.

“Jadi memang ada konspirasi terkait pemberangkatan dan juga dalam konteks pembayaran haji,” kata Marwan Jafar kepada awak media di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (9/9).

Pansus Angket Haji DPR RI saat ini masih menggelar agenda Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersama tim verifikasi kuota haji khusus, regular dan tambahan, untuk diminta keterangan lebih lanjut. Kendati demikian, rapat yang awalnya dijadwalkan terbuka harus dialihkan untuk dilakukan secara tertutup oleh ketua sidang yakni Ketua Pansus Haji yang juga merupakan

anggota DPR dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid.

“Ini boleh direkam, tapi tertutup, jangan keluar khusus ini,” ujar Nusron Wahid.

Menurut Nusron, sidang pada hari ini (kemarin) masih bersifat keterangan saksi, sehingga tidak perlu dilakukan secara terbuka. Sebelumnya, dalam pemberian keterangan kepada Pansus Angket Haji, Marwan menyampaikan, Kementerian Agama (Kemendagri) telah menyatakan tiga ribuan calon haji khusus itu diberangkatkan pada musim haji 2024 karena adanya sisa kuota.

Dengan demikian, menurut Marwan, Pansus Angket Haji akan meneliti

modus Kemenag memberangkatkan sebanyak 3.503 jemaah.

Pada bagian lain, Marwan Jafar mengatakan, tim verifikasi haji pada agenda RDPU menyatakan, mereka mendapat intervensi dari petinggi terkait, yakni Kemenag. “Apakah verifikasi-verifikasi itu memang mereka independen atau ada intervensi dari atasan dan setelah kita tanyakan, mereka menjawab itu ada intervensi dari atasannya,” kata Marwan Jafar di sela-sela kegiatan agenda RDPU bersama tim verifikasi Haji 2024.

Menurutnya, kasus ini harus terus dikawal, bahkan jika perlu memanggil penegak hukum untuk bisa secara bersama meninjau permasalahan yang terjadi pada kegiatan haji di tahun 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Analisis Jogja QRISTimewa

Cicilia Melly Andita Hendary

KELANCARAN sistem pembayaran memainkan peran penting dalam memastikan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah tuntutan masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi biaya, digitalisasi sistem pembayaran menjadi jawaban yang tepat. Bank Indonesia, melalui Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (KPwBI DIY) meluncurkan program Jogja QRISTimewa untuk memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran khususnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Yogyakarta.

Program ini sejalan dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPi) 2025 dan BSPi 2030 yang baru diluncurkan pada 1 Agustus 2024 untuk mengedepankan sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan aman sebagai fondasi integrasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Program Jogja QRISTimewa menjadi kampanye utama yang diluncurkan dengan semangat kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk perluasan pembayaran digital di Yogyakarta.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:39	14:56	17:39	18:48	04:20
Selasa, 10 September 2024	Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY				

Mahasiswa Penjaga dan Penguat Demokrasi



Anies Baswedan berbicara dalam talkshow interaktif.

YOGYA (KR) - Kondisi demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan serius. Anak-anak muda terutama mahasiswa punya tugas penting menjaga dan menguatkan demokrasi di Indonesia tersebut.

“Reformasi 25 tahun yang lalu, yang paling depan bekerja adalah mahasiswa, saat ini yang juga paling depan menjaga dan menguatkan demokrasi adalah mahasiswa. Ini menjadi PR kita bersama,” terang Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022) dalam talkshow interaktif bertema ‘Demokrasi dalam Genggaman: Bagaimana Anak Muda Memimpin Perubahan di Era Digital’ di Pendopo Wisma Kagama Yogyakarta, Senin (9/9).

*** Bersambung hal 7 kol 5**

PESAWAT TRIGANA TERGELINCIR DI PAPUA Seluruh Penumpang Dievakuasi ke RSUD Serui



KR-Antara/HO-Basamas

Personel Kantor SAR Biak memeriksa badan pesawat Trigana Air PK YSP ATR 42-500 yang tergelincir hingga keluar lintasan di Bandara Stevanus Rumbewas Kamanap Kepulauan Yapen, Papua, Senin (9/9/2024).

JAYAPURA (KR) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyebutkan, 42 penumpang termasuk pilot dan co-pilot Pesawat Trigana PK YSP ATR 42-500 yang tergelincir di Bandara Kamanap Serui, Papua, telah dievakuasi ke RSUD Serui.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo di Jayapura, Senin (9/9) mengatakan, semua penumpang selamat dan sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Serui.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

MPR SERAHKAN SURAT KE KELUARGA SOEKARNO TAP MPRS XXXIII/1967 Tak Berlaku Lagi



KR-Antara/Dhemas Revlyanto

Putra Sulung Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra, menyampaikan kata sambutan pada Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 tentang

Pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno,” kata Bamsuet, sapaan karib

Kampanye Kotak Kosong Perlu Diatur

YOGYA (KR) - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong demi menjaga asas keadilan pada Pemilu 2024.

Mada Sukmajati saat dihubungi, Senin (9/9), menekankan hal itu mengingat banyak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024. “Saya kira perlu ada aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong dalam Peraturan KPU,” ujar Mada.

Ia menuturkan, selama ini tidak ada larangan terkait kampanye kotak kosong, namun di sisi lain tak ada regulasi yang mengatur apabila kotak kosong itu benar-benar dikampanyekan masyarakat secara masif. Menurut Mada, memfasilitasi aturan kampanye tersebut bukan berarti KPU mendukung kotak kosong atau khawatir dianggap mengajak orang lain golput atau tidak memilih.

Sebaliknya, katanya, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan asas keadilan bagi calon tunggal dalam berkontestasi melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

“Memang ini dilematis tapi ini perlu diatur. Bayangkan ruang dan waktu kampanye bagi calon tunggal ada aturan dan batasannya, sedangkan kampanye calon tunggal dibebaskan dan tidak diatur secara khusus,” jelasnya.

Menurut Mada, aturan terkait kampanye kotak kosong mendesak diperlukan terlebih apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pemilu yang meminta opsi kotak kosong dalam kertas suara diberlakukan di semua daerah penyelenggara Pilkada 2024.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

*** Bersambung hal 7 kol 1**

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● SEPUPU saya memelihara banyak burung. Saat Paman meninggal dan semua sibuk, burung-burung itu telantar sehari-hari. Keesokan harinya saat akan dijemur, ada yang masuk angin. Burung itu diberi obat yang biasa untuk obat manusia. Namun burung itu kemudian mati setelah disuapi kopi hangat. (Fery Yanni, Candirejo RT 02 RW 01 Puluhan, Jatinom Klaten)-d